

**PENGARUH AUDIT *FEE*, JASA NON AUDIT DAN  
LAMA HUBUNGAN TERHADAP INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Ronaldo Kusnadi  
130810075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

**PENGARUH AUDIT *FEE*, JASA NON AUDIT DAN  
LAMA HUBUNGAN TERHADAP INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Ronaldo Kusnadi  
130810075**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
2017**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,

Ronaldo Kusnadi

130810075

**PENGARUH AUDIT *FEE*, JASA NON AUDIT DAN  
LAMA HUBUNGAN TERHADAP INDEPENDENSI  
AKUNTAN PUBLIK DI KOTA BATAM**

**Oleh:  
Ronaldo Kusnadi  
130810075**

**SKRIPSI  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 16 Februari 2017**

**Yuliadi, S.Si., M.Ak.  
Pembimbing**



## ABSTRAK

Independensi merupakan sikap akuntan publik untuk tidak memihak. Akuntan publik harus benar-benar independen dalam melaksanakan tugas profesionalnya, sikap mental independen menurut masyarakat inilah yang sulit untuk dipertahankan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh audit *fee*, jasa non audit dan lama hubungan terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor di kantor akuntan publik di Batam. Sampel pada penelitian ini sebanyak 55 responden dengan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, kepada responden tersebut diajukan beberapa pernyataan mengenai audit *fee*, jasa non audit, lama hubungan dan independensi akuntan publik dengan alternatif jawaban yang disediakan dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju dengan skor 1 s/d 5. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisioner. Data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit *fee* berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik dengan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 0,05$ . Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh jasa non audit, yang berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dan lama hubungan berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik dengan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ . Audit *fee*, jasa non audit dan lama hubungan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi akuntan publik dengan nilai signifikan  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$ . Nilai *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variansi independensi akuntan publik sebesar 91,3% sedangkan sisanya sebanyak 8,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Audit *Fee*, Jasa Non Audit, Lama Hubungan, Independensi Akuntan Publik

## **ABSTRACT**

*Independence is an attitude of public accountant for not take one side. Public accountant should be independent in their profession tasks. This independence attitude is difficult to dependable in perception of community. This study was conducted to determine the effect of audit fees, non-audit services and audit tenure on public accountant independence. The population in this study was the auditors who worked in the public accountant's office in Batam. Sample in this study of 55 respondents to the sampling technique used was boring sampling, they asked to indicate about audit fee, non-audit services, audit tenure and public accountant's independence with answer alternatives range from very disagreed to very agreed, scored 1 to 5. The data collection method used is the method of questionnaires. The data used are primary data. Data analysis technique used is the technique of multiple linear regression analysis. Methods of data analysis in this research is quantitative method. The results showed that audit fees significantly influence public accountant independence with a significant  $0,010 < 0,05$ . The same results also showed by non-audit services, which significantly influence public accountant independence with a significant  $0,000 < 0,05$  and audit tenure significantly influence public accountant independence with a significant  $0,000 < 0,05$ . Audit fees, non-audit services and audit tenure jointly significant effect on public accountant independence with a significant  $0,000$  smaller than  $0,05$ . Adjusted R Square shows that the public accountant independence at 91,3% while the remaining 8,7% is influenced by other variables not examined.*

*Keywords: Audit Fees, Non Audit Services, Audit Tenure, Public Accountan Independence*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Bapak Yuliadi, S.Si., M.Ak. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Bapak Riyanto, SE, Ak. selaku Akuntan Publik.
6. Seluruh staff karyawan Akuntan Publik di Kota Batam.

7. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan kasihi, dan adik-adik tercinta yang telah memberikan bantuan, dukungan baik berupa moril maupun materi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Steven Wang, Tan Lili, Jusnani, Yuliana, Emelia, Enny, Jefri, Joko dan Erik yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua sahabat dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat serta kasihNya, Amin.

Batam, Februari 2017

Ronaldo Kusnadi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam dunia perekonomian dan bisnis, kebutuhan akan informasi menjadi salah satu hal yang mutlak. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi, yang dituangkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan belum dapat dikatakan bahwa mutunya sudah bagus, maka sangat diperlukan kehadiran pihak ketiga untuk memberikan jaminan dan meningkatkan kepercayaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Pihak ketiga yang diharapkan dapat meningkatkan mutu dari laporan keuangan tersebut adalah akuntan publik. Audit laporan keuangan perusahaan oleh akuntan publik dapat juga meningkatkan kredibilitas perusahaan yang bersangkutan sehingga memperoleh kepercayaan bahwa laporan keuangan yang disajikan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan klien, tetapi juga kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak mengerti persoalan akuntansi dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana situasi atau keadaan yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan, terkait aktivitas yang dijalankan. Kehadiran akuntan publik sangat diharapkan dapat mengupas persoalan-persoalan yang tidak diketahui oleh masyarakat.

Kualitas akuntan publik dalam melaksanakan audit sangat bergantung pada kompetensi dan independensi. Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh akuntan publik diatur dalam standar auditing, yang terdiri dari 10 standar auditing dan dibagi menjadi 3 kelompok: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Salah satu dari ketiga standar mengandung suatu sikap yang wajib dimiliki seorang akuntan publik dalam mengaudit, yaitu independensi. Independensi mengandung makna bahwa bebas dari pengaruh pihak lain, dan terdapat unsur kejujuran dalam sikap ini.

Kode etik profesi akuntan publik menyebutkan bahwa setiap praktisi yang memberikan jasa *assurance* harus bersikap independen terhadap klien *assurance*. Independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) sangat dibutuhkan untuk memungkinkan praktisi untuk menyatakan pendapat, atau memberikan kesan adanya pernyataan pendapat, secara tidak bias dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh pihak lain.

Akuntan publik pada prakteknya mengalami kesulitan dalam mempertahankan dan menjaga independensi. Salah satu kasus dalam negeri yang menimpa akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata. Berdasarkan berita yang bersumber dari hukumonline.com., Rabu, 28 Maret 2007, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima

Hukumonline, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.

Skandal yang hampir sama tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menimpa Enron, berdasarkan berita yang bersumber dari *bbc.co.uk.*, *Saturday, 15 June 2002, A jury in the United States has found accountancy firm Arthur Andersen guilty of obstructing justice by shredding documents relating to the failed energy giant Enron. Enron's collapse last December was partly blamed on questionable accounting that kept hundreds of millions of dollars in debt off its books. Andersen, which audited Enron's accounts, went on trial in Houston, Texas, after allegations that employees had illegally destroyed thousands of documents and computer records relating to its scandal-hit client, which was based there.*

Arthur Andersen adalah KAP (Kantor Akuntan Publik) yang mengaudit laporan keuangan Enron dalam prosesnya kehilangan independensinya, karena memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas bangkrutnya Enron. KAP Andersen tetap mempertahankan kliennya, walaupun mereka tahu risiko yang sangat tinggi terkait praktek akuntansi dan bisnis Enron. KAP Arthur

Andersen pernah menjadi anggota KAP terbesar di dunia bersama *Deloitte Touche Tohmatsu*, *PricewaterhouseCoopers*, *Ernst & Young*, dan KPMG. Reputasi yang sudah dibangun KAP Arthur Andersen hilang karena tidak independennya Andersen dalam melaksanakan audit.

Akuntan publik setelah menyelesaikan audit atas laporan keuangan akan menerima tambahan nilai ekonomis atau biasa disebut audit *fee*. Audit *fee* yang kecil dan besar dapat berpengaruh terhadap independensi akuntan publik, karena dengan tingginya audit *fee* klien kepada akuntan publik dapat menyebabkan suatu budaya ketergantungan atau rendahnya audit *fee* dapat membuat seorang akuntan publik merasa enggan atau setengah hati mengaudit laporan keuangan. Hal ini dapat membuat akuntan publik ‘tutup mata’ terhadap laporan keuangan perusahaan, sehingga sikap atau mental independensinya akan menjadi hancur.

Akuntan publik tidak hanya menawarkan jasa audit saja, tetapi dapat juga memberikan jasa non audit atau dalam dunia akuntansi dikenal jasa non *assurance*. Seorang akuntan publik sering kali memberikan saran terkait manajemen klien, karena merasa dekat dengan klien dan tidak ingin menimbulkan anggapan bahwa seorang akuntan publik tidak bisa berbuat apa-apa, maka ia terpaksa meninggalkan sikap independen yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan publik.

Jangka waktu penugasan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien tergantung dari lama penugasan audit (*audit tenure*). Proses audit akan membutuhkan waktu, karena akuntan publik harus memeriksa atau mengaudit dengan cermat dan seksama. Hubungan antara akuntan publik dan klien yang



lama selama proses audit akan memiliki manfaat positif dan manfaat negatif. Sisi positif yang dapat diambil yakni: seorang akuntan publik memiliki sebuah *network* dalam dunia bisnis dan memahami lebih jauh tentang perusahaan klien. Sisi negatif dari hubungan yang lama antara akuntan publik dengan klien yakni: melupakan batasan antara profesional dengan sosial, yang dapat menyebabkan goyahnya sikap independen seorang akuntan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan berjudul **Pengaruh Audit *Fee*, Jasa Non Audit, dan Lama Hubungan Terhadap Independensi Akuntan Publik di Kota Batam.**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Perusahaan memerlukan jasa seorang akuntan publik supaya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 2) Akuntan publik pada prakteknya masih belum dapat mempertahankan sikap independennya.
- 3) Masih banyak akuntan publik yang tidak mematuhi standar auditing dan kode etik profesi akuntan publik.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah :

- 1) Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor akuntan publik di Kota Batam.

- 2) Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan sebagai variabel bebas dan independensi sebagai variabel terikat.
- 3) Responden dalam penelitian ini adalah para akuntan publik yang berada dalam kantor akuntan publik di Kota Batam.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh audit *fee* terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam?
- 2) Bagaimana pengaruh jasa non audit terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam?
- 3) Bagaimana pengaruh lama hubungan terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam?
- 4) Bagaimana pengaruh audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan secara bersama-sama terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- 1) Pengaruh audit *fee* terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.
- 2) Pengaruh jasa non audit terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.

- 3) Pengaruh lama hubungan terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.
- 4) Pengaruh audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan secara bersama-sama terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan lebih memahami mengenai audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan pembelajaran mengenai independensi seorang akuntan akuntan publik, serta mengetahui pengaruh audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada:

#### 1) Bagi Peneliti

- a. Sebagai sebuah bekal pengalaman dalam mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari di kampus.
- b. Sebagai sebuah Tugas Akhir (skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Putera Batam.

2) Bagi Akademik

- a. Sebagai bahan pembelajaran dalam menambah ilmu ekonomi bagi mahasiswa akuntansi yang pada masa akan datang terjun sebagai ahli ekonomi.
- b. Sebagai bahan referensi kepustakaan di Universitas Putera Batam.

3) Bagi Akuntan Publik

Sebagai bahan pertimbangan, saran, dan bahan evaluasi bagi para akuntan publik di Kota Batam supaya dapat mempertahankan independensinya.

4) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan pembelajaran bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Teoritis**

##### **2.1.1 Independensi Akuntan Publik**

Auditing (Ardiyos, 86) adalah verifikasi data akuntansi (*accounting data*) untuk menentukan ketelitian dan kepercayaan atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Auditing dilaksanakan oleh seorang auditor atau akuntan publik. Pelaksanaan auditing yang telah diselesaikan oleh seorang auditor atau akuntan publik akan disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan audit akan memberikan kepastian dari sebuah laporan keuangan perusahaan. Kualitas dari laporan audit yang dihasilkan oleh akuntan publik sangat bergantung pada kompetensi dan independensi seorang akuntan publik.

Seorang akuntan publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan harus perdoman pada standar auditing. Menurut Herry (2011: 1), standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis klien-nya.

Tujuan dilakukannya audit laporan keuangan oleh auditor, adalah untuk memberikan pendapat akuntan atas kelayakan penyajian laporan keuangan, berkenaan dengan posisi keuangan, hasil operasi dan arus uang dalam

hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. (Tandiontong, 2016: 71)

Pada prakteknya, standar auditing yang berlaku untuk umum dan paling banyak digunakan adalah *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). Menurut Arens, *et al.*, (2015: 38) standar auditing telah diorganisasikan bersama dengan 10 standar auditing yang berlaku umum (GAAS), yang dibagi menjadi 3 kategori: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

Berdasarkan standar auditing yang berlaku umum terdapat suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik atau auditor, yaitu independensi. Sikap independen yang dimiliki akuntan publik dapat menghasilkan laporan audit yang objektif.

Menurut Halim (2015: 48) independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.

Menurut Tandiontong (2016: 85) independensi mengacu pada sikap mental tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi demi menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka. Auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan sering kali disebut auditor independen. (Arens, *et al.*, 2015: 3)

Menurut Mayangsari dan Puspa (2013: 13) dua karakteristik auditor independen adalah (a) posisi mereka independen terhadap klien dalam

melaksanakan pekerjaan audit dan melaporkan hasil auditing, dan (b) untuk berpraktik mereka harus memperoleh ijin sebagai akuntan publik.

Menurut Kode Etik Insitut Akuntan Publik Indonesia (2008: 45-46) independensi yang diatur kode etik mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

- a) Independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.
- b) Independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP.

Kode perilaku profesional AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA (*International Ethics Standard Board for Accountants*) dalam Arens, *et al.*, (2015: 102-103) mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari 2 komponen: independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias, dan

independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Menurut penelitian Pancawati Hardiningsih (2010: 63) independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena:

- 1) Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.
- 2) Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Menurut Ahmad (2012) dalam penelitian Aziz, dkk., (2015: 145) menyatakan bahwa dalam rangka menjalankan perannya, sangat penting bagi auditor bersikap independen dari manajemen perusahaan. Independensi auditor penting karena merupakan jantung dari profesi audit.

### **2.1.2 Audit Fee**

Audit *fee* diterima oleh seorang akuntan publik setelah ia menyelesaikan proses auditing atas laporan keuangan perusahaan. Tahap akhir dari sebuah proses auditing dilaporkan oleh seorang akuntan publik dalam bentuk laporan audit.

Menurut Ardiyos (401) *fees* adalah imbalan yang dipungut atas jasa-jasa yang diberikan oleh suatu badan atau perorangan. Komisi tersebut dihubungkan



dengan nilai moneter dari jasa-jasa tersebut. Menurut Mulyadi (2009: 63-64) dalam penelitian Waluyo dan Bambang (2015: 5) audit *fee* merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan pekerjaannya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

Menurut Halim (2015: 108) ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan audit *fee*, yaitu :

- a) *Per diem basis*. Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.
- b) *Flat* atau kontrak *basis*. Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.
- c) *Maksimum fee basis*. Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Menurut Halim (2015: 108) besarnya *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun demikian pada dasarnya ada 4 faktor dominan yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu:

- 1) Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
- 3) Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain.
- 4) Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

### **2.1.3 Jasa Non Audit (*non-audit service*)**

Akuntan publik tidak hanya menyediakan jasa audit, tetapi juga menawarkan jasa non audit. Menurut Mayangsari dan Puspa (2013: 4-7) profesi akuntan publik atau auditor independen memberikan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yang dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:

- 1) Jasa penjaminan (*assurance services*). Jasa penjaminan adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Salah satu jenis jasa penjaminan yang diberikan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen adalah jasa astetasi.
- 2) Jasa bukan penjaminan (*non-assurance services*). Jasa bukan penjaminan adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor independen yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Menurut Arens, *et al.*, (2015: 11) KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar lingkup jasa *assurance*. Tiga contoh yang spesifik adalah: jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen.

Menurut Halim (2015: 21) ada 3 jenis jasa nonatestasi yang diberikan sutau kantor akuntan publik:

- 1) Jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa komplikasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat.
- 2) Jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak.
- 3) Jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen atau *management advisory services* (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Akuntan publik, dengan kapasitasnya sebagai konsultan, tidak dibenarkan membuat ataupun menentukan keputusan manajemen.

Jasa bukan penjaminan (*non-assurance services*) dapat dikatakan jasa non audit. Jasa non audit yang diberikan oleh auditor adalah jasa akuntansi dan

pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen (Paramastri dan Dharma, 2016: 755).

#### **2.1.4 Lama Hubungan (*audit tenure*)**

Lama hubungan dalam penelitian adalah lama hubungan audit yang dilaksanakan oleh auditor atas audit laporan keuangan perusahaan klien.

*Audit tenure* dalam penelitian Yanti, dkk., (2014: 134) adalah lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut terhadap suatu klien yang diukur berdasarkan jumlah tahun. *Audit tenure* tergantung jangka waktu yang diambil oleh seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan perusahaan.

Ketentuan tentang pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik serta komposisi KAP diatur dalam PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- 1) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit (*tenure KAP*) oleh suatu KAP kepada perusahaan adalah 6 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa suatu KAP selama 6 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti KAP untuk audit tahun berikutnya (rotasi KAP).
- 2) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit oleh auditor (*tenure AP*) kepada perusahaan adalah 3 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa seorang auditor selama 3 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti auditor untuk audit tahun berikutnya.

- 3) Perusahaan dapat menggunakan jasa KAP dan/atau auditor yang telah mencapai batas maksimal tersebut kembali setelah perusahaan diaudit oleh KAP dan/atau auditor lain selama satu tahun buku.
- 4) Peraturan perubahan komposisi akuntan publik pada suatu KAP berimplikasi pada kewajiban rotasi KAP. KAP yang berganti rekan (sehingga berganti nama) dan/atau melakukan perubahan komposisi akuntan publiknya, namun 50% atau lebih akuntan publiknya masih sama, dianggap sebagai KAP yang sama.

#### **2.1.5 Akuntan Publik**

Akuntan publik adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akuntansi publik, yaitu menyerahkan rupa-rupa jasa akuntansi untuk organisasi bisnis ataupun nonbisnis (Sugiri dan Bogat, 2008: 7)

Menurut Yuwono (2011: 219) akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan telah mendapatkan izin usaha dari pihak yang berwenang.

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 2011 tentang akuntan publik, kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.

Menurut pasal 18 Undang-Undang No.5 tahun 2011, izin untuk membuka kantor akuntan publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Izin usaha KAP diberikan oleh Menteri
2. Syarat mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan;
  - d. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga profesional pemeriksa di bidang akuntansi;
  - e. Memiliki surat pernyataan dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
    - 1) Alamat akuntan publik;
    - 2) Nama dan domisili kantor; dan
    - 3) Maksud dan tujuan pendirian kantor;

f. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan dihadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d, yang paling sedikit mencantumkan:

- 1) Nama rekan;
- 2) Alamat rekan;
- 3) Bentuk usaha;
- 4) Nama dan domisili usaha;
- 5) Maksud dan tujuan pendirian kantor;
- 6) Hak dan kewajiban sebagai rekan; dan
- 7) Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara rekan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri

Pada tahun 2014 Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan No.25/PMK.01/2014 tentang akuntan beregister Negara. Pasal 2 ayat (3) dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lulusan pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
- b. Berpengalaman di bidang akuntansi; dan
- c. Sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 2011 dalam pasal 6 ayat (1), dikatakan bahwa untuk mendapatkan izin menjadi akuntan publik, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;
- b. Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik
- f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- h. Tidak berada dalam pengampunan.

Menurut Arens, *et al.*, (2015:12-15) akuntan publik melakukan 3 jenis utama audit:

1. Audit operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem computer yang baru dipasang.



2. Audit ketaatan (*compliance audit*)

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

3. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu.

Menurut Halim (2015: 20) jasa yang diberikan oleh para staf profesional suatu kantor akuntan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: jasa astetasi dan jasa non astetasi.

Menurut Mayangsari dan Puspa (2013: 5) auditing merupakan bentuk pemberian jasa penjaminan yang paling banyak dilakukan oleh profesi akuntan publik atau auditor independen dibandingkan dengan jasa penjaminan lainnya.

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Financial Accounting Standard Boards (FASB) menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas merupakan dua kualifikasi utama yang membuat informasi akuntansi (laporan keuangan) dapat berguna bagi pengambil keputusan. Melihat hal itu, perusahaan memerlukan jasa akuntan publik untuk dapat meningkatkan kualitas laporannya dan menyakinkan pihak eksternal.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat

keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi (Yuwono, 2011: 218)

Menurut Halim (2015: 64) manfaat ekonomis audit yaitu: meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan mendorong efisiensi pasar modal.

Akuntan publik dalam menjalankan proses audit dipandu oleh standar auditing yang berlaku umum (GAAS). Menurut Hery (2011: 1) standar auditing yang berlaku umum (GAAS) dapat dibagi menjadi 3 kategori berikut:

a) Standar Umum

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecapakan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit.

3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

c) Standar Pelaporan

1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan di mana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor ini harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

Akuntan publik yang menyediakan jasa audit juga harus memperhartikan kualitas audit. Menurut Tandiontong (2016: 168) kualitas audit dapat diukur dari :

- 1) Independensi. Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi individual untuk mempertahankan perilaku yang tepat atau pantas di dalam perencanaan program auditnya, mempertahankan kinerjanya ketika melakukan pemverifikasian, dan menyiapkan laporan. Sebaliknya, independensi profesi berhubungan dengan citra auditor sebagai sebuah kelompok.
- 2) Kompetensi. Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Menurut Halim (2015: 102) ada 2 langkah yang dilakukan untuk menentukan kompetensi dalam melaksanakan audit, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi tim audit yang diperlukan. Identifikasi tim audit yang diperlukan dilakukan melalui pemahaman sekilas mengenai karakteristik bisnis dan sistem informasi klien. Sebagai contoh, klien yang bergerak dalam bisnis modal ventura dan mengolah datanya dengan sistem informasi terkomputerisasi penuh maka tim audit yang dibentuk harus terdiri dari beberapa orang yang kompeten dalam hal itu.
- 2) Mempertimbangan perlunya konsultasi dan tenaga spesialis. Seandainya perlu, tim audit dapat didukung dengan menggunakan spesialis maupun mengadakan konsultasi dengan orang yang ahli dalam bidang tertentu yang terkait dalam pelaksanaan audit. Sebagai contoh, klien bergerak dalam industri pertambangan emas maka auditor pasti akan membutuhkan

seorang ahli geologis untuk menilai kandungan emas di daerah yang menjadi wewenang klien. Sebelum menggunakan spesialis, auditor diharapkan memenuhi kualifikasi profesional, reputasi, dan objektivitas spesialis.

Standar pekerjaan lapangan kedua yang dilihat berdasarkan standar auditing yang berlaku umum (GAAS) mewajibkan seorang auditor merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi asistennya. Menurut Hery (2011: 72) untuk dapat membuat perencanaan audit secara memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis kliennya agar dapat memahami kejadian, transaksi, dan praktik yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan klien.

Menurut Halim (2015: 109-120) dikemukakan ada 6 langkah yang dilakukan dalam perencanaan audit, yaitu:

- 1) Menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien

Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan auditor. Pemahaman kejadian, transaksi, dan praktik yang berpengaruh signifikan atas laporan keuangan harus dihimpun oleh auditor. Pemahaman tersebut akan digunakan untuk merencanakan lingkup audit, memperkirakan masalah-masalah yang mungkin timbul, dan menentukan atau memodifikasi prosedur audit yang direncanakan.

2) Melakukan prosedur analitis

Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non keuangan. Dalam standar auditing seksi 329 paragraf 6 dikemukakan bahwa prosedur analitis dalam perencanaan audit harus ditujukan untuk:

- Meningkatkan pemahaman auditor atas bisnis klien dan transaksi atau peristiwa yang terjadi sejak tanggal audit terakhir, dan
- Mengidentifikasi bidang audit yang kemungkinan mencerminkan risiko tertentu yang bersangkutan dengan audit. Jadi, tujuan prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal seperti adanya transaksi dan peristiwa yang tidak biasa, jumlah, rasio serta tren yang dapat menunjukkan masalah yang berhubungan dengan laporan keuangan dan perencanaan audit.

3) Melakukan penilaian awal terhadap materialitas

Materialitas merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam audit laporan keuangan karena materialitas mendasari penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Materialitas adalah besarnya kelalaian atau pernyataan yang salah pada informasi akuntansi yang dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.

4) Menilai risiko audit

Risiko audit adalah risiko yang tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit.

Risiko audit terdiri atas 3 komponen, yaitu:

- Risiko bawaan (*inherent risk*)

Risiko bawaan adalah kerentanan atau mudah tidaknya suatu akun mengalami salah saji material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Auditor tidak dapat mempengaruhi atau mengubah risiko bawaan. Risiko bawaan bervariasi untuk setiap asersi.

- Risiko pengendalian (*control risk*)

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern satuan usaha. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern, semakin kecil risiko pengendalian.

- Risiko deteksi (*detection risk*)

Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor.

5) Mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi yang signifikan

Ada 2 alternatif strategi audit, yaitu:

➤ *Primarily substantive approach*

Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian substantif daripada pengujian pengendalian dalam strategi ini. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini lebih banyak dipakai dalam audit yang pertama kali daripada audit atas klien lama.

➤ *Lower assessed level of control risk approach*

Pada strategi ini, auditor lebih mengutamakan pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Hal ini bukan berarti auditor sama sekali tidak melakukan pengujian substantif, auditor tetap melakukan pengujian substantif meskipun tidak seintensif pada *Primarily substantive approach*. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien.

6) Menghimpun pemahaman struktur pengendalian intern klien

Standar pekerjaan lapangan kedua mengatakan bahwa pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang antara lain meliputi prosedur untuk memperoleh pemahaman struktur pengendalian intern.



Menurut Hery (2011: 49) setelah menyelesaikan semua prosedur, auditor harus menggabungkan informasi yang diperoleh guna mencapai kesimpulan menyeluruh tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses yang subjektif ini sangat mengandalkan pada pertimbangan profesional auditor. Apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien.

Menurut Tandiontong (2016: 87) ada 4 kategori pokok laporan audit atau astetasi lainnya, yaitu: (1) laporang audit yang didasarkan kepada laporan keuangan historis yang disiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; (2) laporan audit khusus yang didasarkan kepada audit atas akun-akun tertentu, prosedur audit yang disetujui atau basis akuntansi selain prinsip akuntansi yang berlaku umum; (3) laporan astetasi didasarkan kepada pelaksanaan penugasan atestasi; dan (4) laporan yang didasarkan kepada pelaksanaan penugasan *review*.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Ferraria Novitasari dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor” pada tahun 2015. Hasil penelitian ini menyimpulkan pemberian jasa lain selain jasa audit dan ukuran KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan, lama hubungan audit dengan klien dan persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan Desak Ruric Pradnya Paramitha Nida dengan judul “Pengaruh persaingan, pemberian jasa lain, dan sifat *Machiavellian*” pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Persaingan antar kantor akuntan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan pada independensi auditor. Pemberian jasa selain audit dan sifat *Machiavellian* berpengaruh negatif dan signifikan pada independensi auditor.

Penelitian yang dilakukan I.D.A.A. Devy Paramastri dan I.D.G. Dharma Suputra dengan judul “Pengaruh audit fee, jasa non audit, ukuran KAP, dan lama hubungan audit terhadap independensi penampilan” pada tahun 2016. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa audit *fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Jasa non audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. Lama hubungan audit dengan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.

Penelitian yang dilakukan Ardiani Ika S. dan R. Satria Wibowo dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi independensi penampilan akuntan publik” pada tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa ikatan kepentingan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Lama hubungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Pesaingan antar KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi

auditor. Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor. Audit *fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	F. Novitasari (2015)	Variabel Independen: pemberian jasa-jasa lain, lama hubungan audit dengan klien, ukuran KAP, dan persaingan antar KAP.  Variabel Dependen: independensi auditor.	(1) pemberian jasa lain selain jasa audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. (2) lama hubungan audit dengan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor. (3) ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. (4) persaingan antar kantor akuntan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor.
2	D. R. P. P. Nida (2014)	Variabel independen: persaingan antar KAP, pemberian jasa selain audit, dan sifat <i>Machiavellian</i> .  Variabel dependen: independensi auditor.	(1) Persaingan antar kantor akuntan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan pada independensi auditor. (2) Pemberian jasa selain audit dan sifat <i>Machiavellian</i> berpengaruh negatif dan signifikan pada independensi auditor.
3	Paramastri dan Suputra (2016)	Variabel independen: audit <i>fee</i> , jasa non audit, ukuran KAP, dan lama hubungan audit.  Variabel dependen: independensi penampilan akuntan publik.	(1) Audit <i>fee</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. (2) Jasa non audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. (3) Ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik. (4) Lama hubungan audit dengan klien berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi penampilan akuntan publik.
4	Ardiani Ika S. dan	Variabel independen:	Ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain

	Ricky Satria Wibowo (2011)	Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lain selain jasa audit lamanya hubungan atau penugasan audit persaingan antar KAP, ukuran KAP, dan audit <i>fee</i> .  Variabel dependen: independensi penampilan akuntan publik.	selain jasa audit, lama hubungan atau penugasan audit, persaingan antar KAP, ukuran KAP dan audit <i>fee</i> secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi auditor.
--	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berupa audit *fee*, jasa non audit dan lama hubungan sedangkan variabel dependen berupa independensi akuntan publik.

### **2.3.1 Hubungan Audit *Fee* dan Independensi Akuntan Publik**

Faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah faktor audit *fee*. Banyak akuntan publik yang tergoyah sikap independen karena ditawarkan oleh tinggi atau rendahnya audit *fee* yang diberikan oleh klien.

### **2.3.2 Hubungan Jasa Non Audit dan Independensi Akuntan Publik**

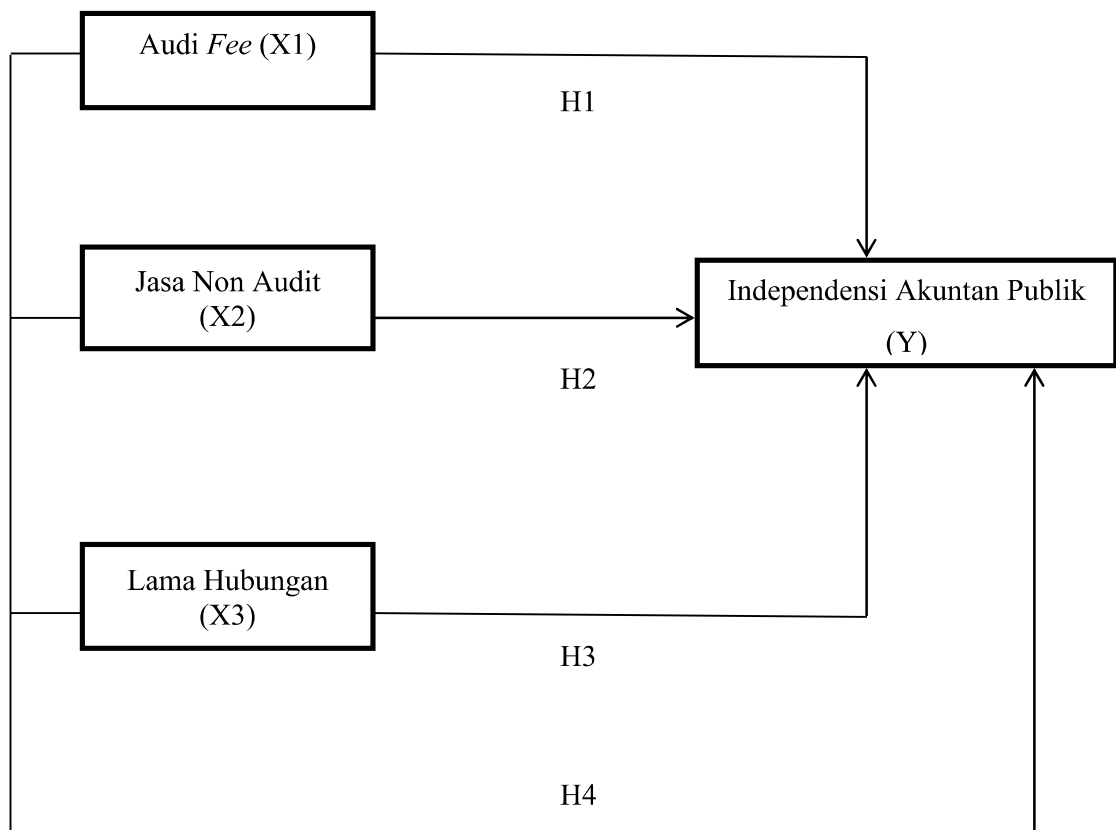
Faktor lain yang mempengaruhi independensi akuntan publik adalah jasa non audit. Akuntan publik dalam profesi dapat menawarkan jasa lain selain audit seperti jasa akuntansi, jasa perpajakan dan jasa konsultasi manajemen. Akuntan publik yang dapat melaksanakan jasa non audit, seringkali melupakan batasan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini dapat membuat sikap independen akuntan publik dilupakan.

### **2.3.3 Hubungan Lama Hubungan dan Independensi Akuntan Publik**

Faktor lain yang mempengaruhi independensi akuntan publik adalah lama hubungan. Hubungan yang tercipta antara akuntan publik dan klien dalam proses

audit adalah hubungan yang bersifat profesional. Akan tetapi, lamanya hubungan yang tercipta antara akuntan publik dan klien dapat berubah sifat menjadi personal. Akuntan publik dan klien merasa sudah dekat dan saling kenal antara satu sama lain akibat lama hubungan yang mereka jalin selama proses pelaksanaan audit.

Berdasarkan landasan teori, tujuan penelitian dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara mengenai suatu hal yang harus diuji terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis dapat muncul karena untuk menduga suatu kejadian tertentu dalam suatu bentuk persoalan yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Jadi dalam konsep penelitian sebuah hipotesis sangatlah diperlukan, karena hal ini akan mengarahkan peneliti kepada rumusan masalah yang dalam penelitian tersebut akan dicari jawabannya.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Audit *fee* berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi akuntan publik.
- H2 : Jasa non audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi akuntan publik.
- H3 : Lama hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi akuntan publik.
- H4 : Audit *fee*, jasa non audit dan lama hubungan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap independensi akuntan publik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Desain Penelitian**

Menurut Martono (2011: 131) desain penelitian adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian.

Menurut Sugiyono (2014: 2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah. Menurut Kountur (2007: 7) metode ilmiah (*scientific method*) merupakan suatu cara memperoleh pengetahuan yang baru atau suatu cara untuk menjawab berbagai permasalahan penelitian yang dilakukan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Berdasarkan jenis data, penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif karena harus terjun ke lapangan.

Penelitian yang digunakan disini adalah dengan menggunakan hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2014: 37) hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Menurut Kountur (2007: 142) penelitian *causal-comparative* coba menentukan suatu sebab dari sesuatu yang sudah terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan terhadap independensi akuntan publik di Kota Batam.



Penelitian ini adalah penelitian ini adalah pekerjaan lapangan yang mengharuskan peneliti mengambil sampel dari suatu populasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan menyebarkan angket atau kuisioner berupa pernyataan tertulis yang diberikan kepada para responden.

### **3.2 Operasional Variabel**

Menurut Sugiyono (2014: 38) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada dasarnya variabel dapat berupa apa saja yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Menurut Kountur (2007: 47) ada 2 ciri khas utama suatu variabel: (1) variabel dapat membedakan suatu benda dengan benda lainnya, (2) variabel harus dapat diukur.

#### **3.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen dalam sebuah penelitian sering disebut variabel bebas. Menurut Sugiyono (2014: 39) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit *fee*, jasa non audit, dan lama hubungan.

### 3.2.1.1 Audit Fee

Menurut Mulyadi (2009: 63-64) dalam penelitian Waluyo dan Bambang (2015: 5) audit *fee* merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan pekerjaannya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

Menurut Halim (2015: 108) ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan audit *fee*, yaitu :

- (a) *Per diem basis*. Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.
- (b) *Flat* atau kontrak *basis*. Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.
- (c) *Maksimum fee basis*. Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Menurut Halim (2015: 108) besarnya *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun demikian pada dasarnya ada 4 faktor dominan yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu:

- 1) Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
- 3) Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain.
- 4) Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

Indikator-indikator yang terdapat dalam audit *fee* adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan *fee*
2. Penetapan *fee*
3. Prosentase pendapatan *fee*

### **3.2.1.2 Jasa Non Audit**

Profesi akuntan publik tidak hanya menawarkan jasa *assurance*, tetapi juga menawarkan jasa non *assurance*.

Menurut Halim (2015: 21) ada 3 jenis jasa nonatestasi yang diberikan sutau kantor akuntan publik:

- 1) Jasa akuntansi. Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa komplikasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam

memberikan jasa akuntansi, praktisi yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan. Dalam memberikan jasa akuntansi, akuntan tidak menyatakan pendapat.

- 2) Jasa perpajakan. Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan kantor pajak.
- 3) Jasa konsultasi manajemen. Jasa konsultasi manajemen atau *management advisory services* (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan klien. Akuntan publik, dengan kapasitasnya sebagai konsultan, tidak dibenarkan membuat ataupun menentukan keputusan manajemen.

Jasa bukan penjaminan (*non-assurance services*) dapat dikatakan jasa non audit. Jasa non audit yang diberikan oleh auditor adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen (Paramastri dan Dharma, 2016: 755).

Indikator yang terdapat dalam jasa non audit yaitu apa saja jasa selain audit yang diberikan oleh akuntan publik kepada para klien yang sama dalam waktu yang bersamaan.

### **3.2.1.3 Lama Hubungan (Audit Tenure)**

*Audit tenure* dalam penelitian Yanti, dkk., (2014: 134) adalah lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut terhadap suatu klien yang diukur berdasarkan jumlah tahun.

Ketentuan tentang pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik serta komposisi KAP diatur dalam PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3. Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

- 1) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit (*tenure* KAP) oleh suatu KAP kepada perusahaan adalah 6 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa suatu KAP selama 6 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti KAP untuk audit tahun berikutnya (rotasi KAP).
- 2) Batas waktu maksimal pemberian jasa audit oleh auditor (*tenure* AP) kepada perusahaan adalah 3 tahun berturut-turut. Setelah perusahaan menggunakan jasa seorang auditor selama 3 tahun berturut-turut, maka perusahaan tersebut wajib mengganti auditor untuk audit tahun berikutnya.
- 3) Perusahaan dapat menggunakan jasa KAP dan/atau auditor yang telah mencapai batas maksimal tersebut kembali setelah perusahaan diaudit oleh KAP dan/atau auditor lain selama satu tahun buku.
- 4) Peraturan perubahan komposisi akuntan publik pada suatu KAP berimplikasi pada kewajiban rotasi KAP. KAP yang berganti rekan (sehingga berganti nama) dan/atau melakukan perubahan komposisi akuntan publiknya, namun 50% atau lebih akuntan publiknya masih sama, dianggap sebagai KAP yang sama.

Indikator yang terdapat dalam lama hubungan yaitu jangka waktu lamanya penugasan audit.

### **3.2.2 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi sasaran atau titik fokus dalam sebuah pengamatan atau penelitian. Variabel ini disebut juga variabel terikat karena perubahan yang terjadi pada variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel perlakuan (Kountur, 2007: 56).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah independensi akuntan publik.

#### **3.2.2.1 Independensi Akuntan Publik**

Menurut Halim (2015: 48) independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit.

Menurut Tandiontong (2016: 85) independensi mengacu pada sikap mental tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Menurut Mayangsari dan Puspa (2013: 13) dua karakteristik auditor independen adalah (a) posisi mereka independen terhadap klien dalam melaksanakan pekerjaan audit dan melaporkan hasil auditing, dan (b) untuk berpraktik mereka harus memperoleh ijin sebagai akuntan publik.

Menurut kode etik Insitut Akuntan Publik Indonesia (2008: 45) independensi yang diatur kode etik mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

- a) Independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.
- b) Independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari anggota tim *assurance*, KAP, atau jaringan KAP.

Menurut penelitian Pancawati Hardiningsih (2010: 63) independensi sangat penting bagi profesi akuntan publik karena:

- 1) Merupakan dasar bagi akuntan publik untuk merumuskan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan keuangan yang telah diperiksa tersebut akan menambah kredibilitasnya dan dapat diandalkan bagi pihak yang berkepentingan.
- 2) Karena profesi akuntan publik merupakan profesi yang memegang kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi auditor ternyata berkurang dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Indikator-indikator yang terdapat dalam independensi adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan pengaruh
2. Kejujuran
3. Idealisme
4. Pelayanan kepentingan umum
5. Tanggung jawab hukum
6. Tanggung jawab profesi
7. Kecakapan auditing dan akuntansi

**Tabel 3.1 Indikator Operasional Variabel**

No.	Variabel/Konsep Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Audit <i>Fee</i> (X1)	<i>fee</i> yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan <i>fee</i></li> <li>b. Penetapan <i>fee</i></li> <li>c. Prosentase pendapatan <i>fee</i></li> </ol>	Likert
2	Jasa Non Audit (X2)	jasa yang diberikan oleh akuntan publik atau auditor independen yang didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. apa saja jasa selain audit yang diberikan oleh akuntan publik kepada para klien yang sama dalam waktu yang bersamaan.</li> <li>b. jenis jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik terhadap klien yang sama dalam waktu yang bersamaan (kuantitasnya).</li> </ol>	Likert



3	Lama Hubungan (X3)	lamanya waktu auditor melakukan pekerjaan audit secara berturut-turut terhadap suatu klien yang diukur berdasarkan jumlah tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jangka waktu lamanya penugasan audit.</li> <li>b. Lamanya penugasan audit seorang partner kantor akuntan publik selama 3 tahun berturut-turut terhadap klien yang sama.</li> </ul>	Likert
4	Independensi akuntan publik (Y)	independensi mengacu pada sikap mental tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kebebasan pengaruh</li> <li>b. Kejujuran</li> <li>c. Idealisme</li> <li>d. Pelayanan kepentingan umum</li> <li>e. Tanggung jawab hukum</li> <li>f. Tanggung jawab profesi</li> <li>g. Kecakapan auditing dan akuntansi</li> </ul>	Likert

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Batam yang terdaftar di IAPI.

**Tabel 3.2 Daftar KAP di Kota Batam**

No	Nama KAP	Alamat KAP	Jumlah Auditor
1	KAP Charles dan Nurlena (Cabang)	Ruko Puri Legenda Blok C 2 No.5, Batam Centre, Batam/Telp (0778)	10

		8096057, 7021520	
2	KAP Idris dan Sudiharto (Cabang)	Komplek Ruko Palm Spring Blok A1 No.2, Batam/Telp (0778) 472556	15
3	KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Cabang)	Ruko Bukit Beruntung Blok C No.2, Sei Panas, Batam/Telp (0778) 466866	18
4	KAP Petrus Dharmanto, S.E., Ak., MM., CA., CPA	Komplek Jodoh Square Blok A No.8, Batam/Telp (0778) 455547	12
5	KAP Riyanto, SE, Ak.	Komplek Ruko Palm Spring Blok B2 No.2, Batam Centre, Batam/Telp (0778) 468405, 468406	10
	Total		65

Sumber: iapi.or.id

### 3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2011: 74). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yang merupakan bagian dari *nonprobability sampling*.

Sampel dalam penelitian ini adalah auditor independen atau akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dalam IAPI. Penelitian ini memiliki sampel yang berjumlah 65 responden, akan tetapi yang dapat diproses

untuk penelitian ini berjumlah 55 responden. KAP Charles tidak mengembalikan 2 lembar kuisisioner, KAP Jamaludin mengembalikan 2 lembar kuisisioner dengan jawaban yang tidak lengkap dan 1 lembar kuisisioner yang hanya berisi identitas responden, serta KAP Riyanto yang tidak mengembalikan 5 lembar kuisisioner.

### **3.4 Teknik Pengambilan Data**

Berdasarkan dari sumber datanya, maka pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data primer yang dikenal dengan data primer. Menurut Sugiyono (2014: 137) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer adalah data yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari responden atau melakukan eksperimen sendiri (Nasution dan Usman, 2006: 100).

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, sebab data ilmiah yang akan menjadi ‘bahan’ analisis guna mendapat solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi (Nasution dan Usman, 2006: 99). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kuisisioner dengan menggunakan skala pengukuran data likert. Menurut Narbuko dan Achmadi (2012: 76) metode kuisisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Kuisisioner didesain dalam 2 bagian, bagian pertama dari kuisisioner berisi tentang deskripsi responden, yaitu data demografi responden, bagian kedua berisi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan audit *fee*, jasa non audit, lama hubungan, dan independensi akuntan publik. Masing-masing kuisisioner disertai

surat permohonan untuk mengisi kuisisioner yang ditunjukkan kepada responden. Surat permohonan tersebut berisi identitas peneliti, maksud penelitian, dan jaminan akan kerahasiaan data penelitian.

Kuisisioner disebarakan secara langsung kepada kantor akuntan publik di Kota Batam untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penulis menyebarkan kuisisioner kepada para responden yang dalam hal ini adalah akuntan publik atau auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa (Sugiyono, 2014: 93):

**Tabel 3.3 Skala Likert**

Bobot	Kategori
5	Sangat setuju
4	Setuju
3	Ragu-ragu
2	Tidak setuju
1	Sangat tidak setuju

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data kedalam organisasi, menjabarkan kedalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014: 244).

### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data-data yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuisioner yang disebarkan akan disajikan dalam bentuk tabel biasa dan table distribusi frekuensi. Tabel ini akan memberikan informasi mengenai ciri-ciri responden dan gambaran mengenai deskriptif variabel independen yaitu audit fee, jasa non audit, dan lama hubungan, serta variabel dependen yakni independensi akuntan publik di Kota Batam.

### **3.5.2 Uji Kualitas Data**

Data-data yang telah dikumpulkan melalui kuisioner terlebih dahulu harus diuji kualitasnya sebelum diolah dan dianalisis. Kualitas data dipengaruhi oleh kualitas instrumen penelitian yang digunakan. Hal ini penting karena data yang tidak valid dan reliabel akan menghasilkan kesimpulan yang bias.

Ada 2 cara untuk menguji kualitas data yakni uji validitas dan uji reliabilitas.

### 3.5.2.1 Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014: 121). Hasil penelitian yang valid menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan sesuai dengan yang diukur.

Uji validitas dalam penelitian ini untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisisioner, apakah item-item yang terdapat dalam kuisisioner sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Ghozali, 2013: 52).

Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0.05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item (Priyatno, 2016: 51). Pada penelitian ini digunakan uji validitas item dengan metode korelasi *Pearson*. Metode uji validitas ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total item (Priyatno, 2016: 53).

Nilai uji akan dibuktikan dengan menggunakan uji dua sisi pada taraf signifikan 0,05 (SPSS akan secara *default* menggunakan nilai ini). Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak, jika:

1. Jika  $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel (sig 0,050)}$ , maka item pada pertanyaan dinyatakan berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan valid.

2. Jika  $r$  hitung  $\leq r$  tabel (sig 0,050), maka item pada pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total item tersebut, maka item dinyatakan tidak valid.

### **3.5.2.2 Uji Reliabilitas**

Menurut Sugiyono (2014: 121) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabel dapat dikatakan dengan istilah lain yakni konsisten.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat konsistensi alat ukur. Menurut Ghazali (2013: 47) suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Untuk penentuan apakah instrumen reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6 (Priyatno, 2016: 60). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  (Nunnally, 1994 dalam Ghazali, 2013: 48).

### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Menurut Sarwono (2013: 153) tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribusi normal, maka dapat dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas.

Menurut Priyatno (2016: 109) ada dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas pada model regresi yaitu dengan analisis grafik (histogram dan normal P-P plot) dan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Pada penelitian ini akan digunakan metode *sample kolmogorov*, di mana untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak, maka cukup membaca pada nilai signifikansi. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka residual terdistribusi secara normal (Priyatno, 2016: 112).

### **3.5.3.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut Priyatno (2012: 93) multikolinearitas adalah keadaan di mana ada hubungan linear secara sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013: 105).

Gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Menurut Ghozali (2013: 106) nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .



### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Gejala ini dapat diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 139). Salah satu cara yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah uji *Glejser*.

Uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika pada uji t nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Priyatno, 2016: 118).

### 3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Priyatno (2012: 80) analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Adapun rumus regresi linear berganda menurut Priyatno (2016: 96) adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad \text{Rumus 3.1 Regresi Linier Berganda}$$

Keterangan:

Y	= Variabel dependen yaitu independensi akuntan publik
X <sub>1</sub>	= Variabel independen Audit Fee
X <sub>2</sub>	= Variabel independen Jasa Non Audit
X <sub>3</sub>	= Variabel independen Lama Hubungan
a	= Nilai konstanta
b <sub>1</sub> ,b <sub>2</sub> ,b <sub>3</sub>	= Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
e	= <i>error</i>

### 3.5.5 Teknik Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis itu didukung oleh fakta. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data. Uji hipotesis merupakan salah satu tahap penting dalam melakukan proses pengujian data.

#### 3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 178). Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau  $\text{Sig} < \alpha$ , maka hipotesis penelitian diterima, jika hipotesis penelitian diterima hal ini menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi

variabel dependen dan juga sebaliknya. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t terdapat tiga hipotesis sebagai berikut:

1. Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

$H_0$  : Audit *Fee* secara parsial tidak berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

$H_a$  : Audit *Fee* secara parsial berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

2. Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

$H_0$  : Jasa Non Audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

$H_a$  : Jasa Non Audit secara parsial berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

3. Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

$H_0$  : Lama Hubungan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

$H_a$  : Lama Hubungan secara parsial berpengaruh terhadap Independensi Akuntan Publik

Kriteria Penilaian (Sugiyono, 2014: 184)

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad \text{Rumus 3.2 t-hitung}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi  
 $r^2$  = Koefisien determinasi  
n = Sampel

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima.
2. Jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.
3. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

### 3.5.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013: 177). Uji F digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Uji F digunakan untuk melihat tingkat probabilitas secara keseluruhan. Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05$  maka dianggap signifikan, atau dengan mencari F hitung yang nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Hipotesis Keempat ( $H_4$ ) adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Keempat ( $H_4$ )

$H_0$  : Audit Fee, Jasa Non Audit dan Lama Hubungan tidak berpengaruh secara simultan terhadap Independensi Akuntan Publik

Ha : Audit *Fee*, Jasa Non Audit dan Lama Hubungan berpengaruh secara simultan terhadap Independensi Akuntan Publik

Rumus yang digunakan untuk menguji simultan atau uji F (Sugiyono, 2014: 192) adalah:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)(n - k - 1)} \quad \text{Rumus 3.3 Uji Simultan (Uji F)}$$

Keterangan:

F = F Hitung

k = Jumlah variabel bebas

R<sup>2</sup> = Koesifisien determinasi

n = Jumlah Sampel

Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Priyatno, 2012: 57-58):

1. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak.
3. Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.

### 3.5.5.3 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Priyatno, 2016: 97). Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi (Ghozali, 2013: 177). Menurut Priyatno (2014: 156) angka

dalam koefisien determinasi akan diubah dalam bentuk persen, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

### 3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

#### 3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik kota Batam yang terdaftar di IAPI.

#### 3.6.2 Jadwal Penelitian

**Tabel 3.4 Jadwal Penelitian**

KEGIATAN PENELITIAN	SEPT	OKT 2016					NOV	DES			JAN 2017			FEB	
	2016														
	PERTEMUAN KE-														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Perancangan	■	■													
Studi Pustaka			■	■	■										
Penentuan Model Penelitian						■	■	■							
Penyusunan Kuisisioner									■	■					
Analisis Hasil Kuisisioner											■	■			
Kesimpulan													■	■	